



Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan

Pepy Arianti^{1*}, M. Fachri Adnan²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari kurang optimalnya keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun perempuan memiliki kemampuan sosial yang baik, seperti dalam interaksi sehari-hari maupun di dunia digital, partisipasi mereka dalam politik masih rendah. Akses informasi dan pengetahuan mendukung kemampuan bersosialisasi perempuan, namun, keterlibatan mereka dalam politik, termasuk diskusi terkait pemilu dan kepanitiaan pemilu, tetap minim. Walaupun mereka kerap menggunakan hak pilih saat pemilu, peran mereka dalam pembahasan isu-isu pemilu masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik perempuan serta kaitannya dengan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pesisir Selatan, dan metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Sampel sebanyak seratus orang dipilih dengan menggunakan teknik Multistage Random Sampling dari populasi penelitian yang terdiri dari wanita berusia 17-66 tahun. Dengan menggunakan korelasi Pearson dan statistik deskriptif, data diperiksa setelah dikumpulkan melalui kuesioner. Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan politik perempuan pada Pilpres Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 hanya sebesar 34,12%, persentase yang rendah. Nilai Korelasi Pearson sebesar 0,197 dan tingkat signifikansi 0,050, yang tidak signifikan secara statistik, menunjukkan adanya hubungan positif yang sangat lemah antara keterlibatan politik dan tingkat pendidikan. Pada saat yang sama, terdapat hubungan negatif yang sangat lemah (nilai asosiasi Pearson -0,142, tingkat signifikansi 0,159), yang juga tidak signifikan secara statistik, antara jenis pekerjaan dan aktivitas politik.

Kata Kunci: Politik Perempuan, Partisipasi Politik, Pemilihan Presiden

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1868>

*Correspondence: Pepy Arianti
Email: pepyarianti449@gmail.com

Received: 01-10-2024

Accepted: 11-11-2024

Published: 10-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study is based on the suboptimal involvement of women in politics. Although women have good social skills, such as in daily interactions and in the digital world, their participation in politics is still low. Access to information and knowledge supports women's social skills, however, their involvement in politics, including discussions related to elections and election committees, remains minimal. Although they often exercise their right to vote during elections, their role in discussing election issues is still limited. This study aims to examine the level of women's political participation and its relationship to education level and type of work. The study site is in Pesisir Selatan Regency, and the methodology employed is a descriptive quantitative approach. A sample of one hundred individuals was chosen using the Multistage Random Sampling technique from the research population, which consisted of women aged 17-66. Utilizing Pearson correlation and descriptive statistics, data was examined after being gathered via questionnaires. Based on the research findings, women's political involvement in the Pesisir Selatan Regency's 2024 presidential election was just 34.12%, a low percentage. The Pearson Correlation value of 0.197 and the significance level of 0.050, which are not statistically significant, indicate a very weak positive link between political engagement and education level. Simultaneously, there is a very weak negative association (Pearson association value of -0.142, significance level of 0.159), which is similarly not statistically significant, between the type of work and political activity.

Keywords: Women's Politics, Political Participation, Presidential Election

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah konsep dan ide besar yang menjadi bagian dari penerapan demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih calon pemimpin mereka. Dalam proses ini, kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di berbagai aspek dijamin bagi setiap individu. Pelaksanaan pemilu menjadi catatan sejarah sebagai bukti bahwa sebuah negara menerapkan sistem demokrasi (Nasir, 2020).

Partisipasi politik adalah salah satu indikator yang paling signifikan dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat dianggap demokratis jika pemerintah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warganya untuk terlibat secara adil dalam berbagai aktivitas. Partisipasi politik menjadi karakteristik utama yang membedakan demokrasi dari sistem lainnya (Adnan et al., 2021). Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan fondasi penting bagi sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi.

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang, dimana pemahaman warga negara mengenai keterlibatan politik biasanya terbatas pada penggunaan hak pilih mereka dalam pemilihan umum untuk memilih wakil atau kandidat. Banyak orang yang masih memegang sikap ini hingga saat ini, meskipun para ahli mendefinisikan keterlibatan politik secara berbeda dari pemahaman kebanyakan orang. Mereka berpendapat bahwa terlibat dalam politik tidak hanya melibatkan pemberian suara; hal ini juga mencakup keterlibatan dalam kampanye langsung dan tidak langsung, berhubungan dengan anggota parlemen atau lembaga pemerintah, dan bergabung dengan partai politik atau gerakan sosial lainnya. Orang-orang yang bergabung dalam suatu partai dan mencalonkan diri dalam pemilu juga dianggap pernah terlibat dalam politik. (Liando, 2016).

Partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh dukungan dari keluarga, komunitas, dan organisasi politik. Namun, tantangan seperti kekerasan berbasis gender dalam politik dan minimnya dukungan finansial menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh perempuan yang ingin terlibat dalam arena politik. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam politik formal sering kali disebabkan oleh budaya patriarki yang masih dominan, di mana laki-laki memiliki kekuasaan lebih atas perempuan, didukung oleh ideologi gender yang memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai produk budaya yang mengakar. Budaya patriarki ini memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk menguasai perempuan di berbagai aspek kehidupan, menjadikan perempuan sebagai kelompok kelas dua. Dalam konteks politik, ada ungkapan yang menyatakan bahwa "perempuan tidak perlu berpolitik," yang mencerminkan pandangan bahwa dunia politik adalah milik laki-laki dan tidak terbuka bagi perempuan. Stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai sosok lemah tidak selaras dengan citra dunia politik yang sering kali dianggap penuh intrik dan tidak bersih (Manurung, 2009:54).

KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024, dengan total pemilih mencapai 380.622 orang, terdiri dari 189.263 pemilih pria dan 191.359 pemilih wanita. Penetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan, partisipasi politik perempuan umumnya masih lebih rendah dibandingkan pria. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah reformasi politik di akhir 1990-an, terdapat peningkatan signifikan dalam keterlibatan perempuan dalam politik.

Pemilih yang paling banyak memberikan suara adalah perempuan, dengan jumlah 168.732, dibandingkan laki-laki yang mencapai 164.229, dari total 332.961 DPT. Pada Pemilu 2024, Partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan penurunan yang signifikan, mencapai level terendah ketiga dalam sejarah pemilu di wilayah tersebut. Dari total 380.622 pemilih yang terdaftar, hanya 291.619 yang menyalurkan hak suaranya, sehingga tingkat partisipasi tercatat sebesar 76,6%. Penurunan ini mencolok, terutama karena pada pemilu sebelumnya, yaitu 2019, partisipasi mencapai 81,54%. Meskipun demikian, tren penurunan ini bukanlah hal baru. Data BPS Pesisir Selatan menunjukkan bahwa pada pemilu 2014, partisipasi pemilih juga turun menjadi 73,71%, dan pada tahun 2009 hanya mencapai 74,19%. Pada tahun 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 95,61%, menandakan bahwa Pesisir Selatan memiliki antusiasme pemilih yang tinggi. Puncak partisipasi terjadi pada tahun 1997, di mana hampir semua pemilih terdaftar, yaitu 99,93%, menggunakan hak suara mereka.

Namun, Demikian masih banyak ditemukan permasalahan dilapangan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan presiden 2024 di kabupaten pesisir selatan. Beberapa permasalahan yang di temukan pada partisipasi perempuan pada pemilihan presiden 2024 di kabupaten pesisir selatan yang sampai saat ini belum optimal yaitu:

Pertama kurangnya keterlibatan politik perempuan menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Masih rendahnya keterlibatan politik perempuan sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah adanya stereotip gender yang masih mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran dan kemampuan perempuan dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepemimpinan. Seringkali ada tantangan yang dihadapi perempuan dalam mendaftar sekaligus terpilih menjadi anggota KPPS tantangan utama meliputi kurangnya dukungan dari keluarga, beban ganda antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan luar, serta stereotip gender yang menganggap pekerjaan KPPS lebih cocok untuk laki-laki. Selain itu cara untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk ikut serta menjadi anggota KPPS yaitu, perlu adanya sosialisasi dan kampanye yang banyak untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam pemilu.

Kedua kurangnya minat perempuan dalam kegiatan politik, termasuk fenomena yang kompleks yang sering kali terkait dengan budaya patriarki, kurangnya representasi perempuan di lembaga politik serta kendala-kendala structural yang menghambat partisipasi perempuan. dengan kendala yang di hadapai perempuan dalam ranah politik,yang berkaitan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, gender, peran domestik (urusan rumah tangga), budaya patriarkhi, serta hubungan kekeluargaan.

Ketiga kurangnya kepercayaan diri politik perempuan untuk mencalonkan diri menjadi relawan pemilu dalam Pilpres juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Stereotip gender yang masih ada dalam masyarakat dapat memengaruhi persepsi perempuan terhadap kemampuan dan peran mereka dalam arena politik, serta dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dan terdapat juga keterbatasan pendidikan bagi kaum perempuan.

Keempat keterlibatan perempuan dalam kegiatan kampanye politik selalu terdekriminasi. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik selalu terdeskriminasi salah satunya dalam kegiatan kampanye, terkadang partisipasi politik perempuan dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan laki-laki hal ini tidak terlepas dari Kendal-kendala yang di hadapai perempuan dalm kegiatan kampanye politik. Dalam pengawasan kegiatan kampanye perempuan lebih sedikit berpartisipasi dibandingkan laki-laki, terkadang banyak hambatan yang sering kali dihadapi perempuan dalam mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk kegiatan kampanye politik mereka, sementara lawan mereka laki-laki lebih mudah mendapatkan dana. Seringkali Ketidakamanan selama kampanye dapat menghambat keterlibatan perempuan, Serta Keterbatasan atau kuranya perempuan dalam akses ke sumber daya kampanye seperti staf, jaringan, dan media.

Selama pemilu, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya mencakup hak untuk memilih, namun juga mencakup pengorganisasian tahapan pemilu, mengawasi pelanggaran terkait pemilu, dan melaporkan setiap dugaan kejahatan. Mereka mengawasi seluruh proses pemilu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan berkontribusi pada pembuatan daftar pemilih akhir. Mereka juga menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal seperti menerima suap atau menyebarkan materi yang menyinggung. Mendorong pemilih yang berakal sehat sangatlah penting selama pemilu karena para pemilih ini resisten terhadap taktik manipulatif seperti politik identitas, politik uang, ujaran kebencian, dan isu-isu yang memecah belah. Namun kesulitannya adalah perempuan pada umumnya kurang terlibat dalam politik; Meskipun mereka menggunakan hak pilihnya, namun mereka jarang terdengar membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu. Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul "Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Yusuf (2017) mendefinisikan penelitian deskriptif kuantitatif sebagai suatu usaha yang terorganisasi dan metodis untuk menggunakan metodologi kuantitatif guna mengumpulkan informasi yang lebih rinci tentang suatu kejadian atau untuk mengatasi suatu isu. Populasi penelitian ini adalah perempuan berusia 17 sampai dengan 66 tahun yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan data KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sebanyak 191.359 perempuan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024. Jumlah responden dalam sampel penelitian ini adalah seratus orang. Karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan jumlah populasi, maka peneliti harus melakukan pengambilan sampel. Peneliti menggunakan Rumus Slovin untuk menentukan sampel. Setiap anggota sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih menurut teknik pengambilan sampel probabilitas (Sugiyono, 2019:92).

Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah Multistage Random Sampling. Pada langkah pertama, digunakan cluster sampling atau sampel berdasarkan wilayah. Pendekatan proporsional random sampling kemudian digunakan pada tahap kedua setelah sampel regional ditetapkan. Lengayang, Sutera, dan Koto XI Tarusan adalah tiga kecamatan yang dipilih sebagai sampel dari total 15 kecamatan yang membentuk populasi. Kuesioner dikirim sebagai bagian dari strategi pengumpulan data. Analisis koefisien korelasi dan analisis statistik deskriptif dilakukan dalam analisis data penelitian ini. Tanpa mencoba untuk menarik kesimpulan yang luas, analisis deskriptif berusaha untuk mengkarakterisasi data yang telah dikumpulkan (Martens, 2018). Biasanya diwakili oleh variabel X dan Y, koefisien korelasi adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien asosiasi, juga disebut sebagai koefisien korelasi, adalah representasi numerik dari kekuatan hubungan ini (Rosalina, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Presiden 2024

Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan presiden Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 diukur berdasarkan sejumlah faktor, termasuk tindakan langsung seperti pemungutan suara dan partisipasi dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi, kampanye, dan peran penyelenggara pemilu. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan perbedaan dalam tingkat keterlibatan, yang mencerminkan seberapa besar partisipasi perempuan dalam politik secara keseluruhan.

a. Voting

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, rata-rata tingkat partisipasi responden dalam memberikan suara mencapai 96%, yang tergolong sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan telah aktif menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi politik perempuan dalam memberikan suara sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo (2008: 367), yang menyatakan bahwa partisipasi politik mencakup aktivitas individu yang terlibat dalam kehidupan politik, termasuk dalam bentuk pemilihan presiden yang berpengaruh pada proses penyusunan kebijakan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutami et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pemberian suara dalam pemilihan dapat menentukan arah demokrasi; dalam penelitian tersebut, partisipasi politik perempuan di Desa Purworejo mencapai 94,5%, juga tergolong sangat tinggi. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara sangat tinggi, bahkan melampaui target partisipasi di tingkat desa.

Namun, penelitian oleh Sepviani (2024) menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam analisis rekapitulasi suara perempuan pada pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020, partisipasi politik perempuan di Kota Jambi tercatat sangat rendah, yakni hanya 57,8%.

b. Partisipasi dalam Diskusi Politik

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, rata-rata partisipasi perempuan dalam wacana politik terkait pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 39%. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih tergolong rendah dalam perbincangan tersebut.

Bagi perempuan khususnya, perbincangan politik seputar pemilu merupakan salah satu cara penting untuk terlibat dalam proses demokrasi. Melalui perbincangan, para pemilih, termasuk perempuan, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik politik, politisi, dan kebijakan yang akan memengaruhi masa depan mereka. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam wacana politik memungkinkan perempuan untuk menyuarakan pikiran, mengeksplorasi berbagai sudut pandang, dan membantu membentuk sikap masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan terwakili dalam politik.

Hasil penelitian Riyanti dkk. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam wacana politik masih rendah, yang sejalan dengan keterlibatan perempuan dalam perbincangan politik. Oleh karena itu, melalui partisipasi dalam organisasi sosial dan kepemudaan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran politik. Dengan mengambil bagian dalam berbagai acara seperti program pengembangan kepemimpinan, kampanye sosial, dan seminar, individu dapat memperdalam kesadaran mereka terhadap isu-isu politik dan menjadi lebih

terlibat dalam masyarakat. Partisipasi mereka melampaui pemilihan umum dan mencakup diskusi, kampanye sosial, dan advokasi untuk perubahan yang konstruktif.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Alfiyani dan Prihatmoko (2023), yang menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Beran dalam proses pembentukan peraturan desa pada tahun 2021 masih tergolong rendah, terlihat dari tingkat kehadiran dan aspirasi perempuan saat musyawarah desa.

c. Menghadiri dan Mengikuti Kampanye

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, rata-rata tingkat partisipasi politik perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadiri dan mengikuti kampanye mencapai 33,75%. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam aktivitas tersebut tergolong rendah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Yoteni A.A et al. (2023), yang menekankan pentingnya peran media massa dalam mempromosikan partisipasi politik perempuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti stereotip gender, kurangnya keterwakilan, sensasionalisme, hambatan akses, dan minimnya pengakuan terhadap kepentingan perempuan dalam politik. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam kegiatan kampanye tetap berada pada tingkat yang rendah di Indonesia.

Penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Musa Karim et al. (2020), yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik perempuan di kalangan Gen-Z di Kota Yogyakarta masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh pola partisipasi politik yang terbatas pada respons terhadap konten dan kesadaran sukarela untuk mengikuti konten politik, tetapi belum mencapai tahap berbagi konten tersebut.

d. Relawan

Rata-rata persentase perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi relawan pasangan calon adalah 33,5%, menurut analisis data yang dilakukan. Statistik ini menunjukkan betapa sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik dalam kapasitas ini. Studi ini berbeda dengan Nasution (2019), yang menemukan bahwa aktivitas penggemar relawan selama Pilkada Kota Pariaman 2018 juga agak rendah, baik secara langsung maupun daring. Melalui konten asli yang diunggah di akun resmi yang terdaftar di KPU, mereka mengedukasi pemilih baru. Para relawan ini juga berpartisipasi dalam kelompok jaringan, mensurvei publik, menyiapkan saksi untuk tempat pemungutan suara, dan melakukan penghitungan suara sebenarnya.

Di sisi lain, rendahnya keterlibatan perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai relawan untuk pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024 bertentangan dengan penelitian oleh Hamdani et al. (2021), yang menunjukkan bahwa relawan Samawi telah melaksanakan berbagai jenis partisipasi politik.

Misalnya, mereka melakukan counter narasi terhadap isu negatif, hoaks, serta kegiatan relawan yang berdampak positif pada peningkatan partisipasi politik pemuda dalam pemilihan presiden 2019 di Kota Tasikmalaya.

e. Menjadi Saksi Dalam Pemilu

Berdasarkan penelitian, rata-rata keterlibatan politik perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemantau pemilu untuk pemilihan presiden 2024 adalah sebesar 17%. Statistik ini menunjukkan betapa sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik ketika mereka berperan sebagai saksi.

Penelitian ini mendukung penelitian Roland et al. (2024) yang menemukan bahwa mahasiswa dapat melakukan pengawasan pemilu dan berpartisipasi dalam edukasi dan sosialisasi melalui berbagai platform, seperti media sosial, media arus utama, dan forum diskusi. Mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan khususnya dapat membantu melakukan pengawasan sebelum, saat, dan setelah pemilu. Sebagai contoh bagi masyarakat, mahasiswa juga dapat berperan sebagai saksi pemilu, mengawasi orang lain, atau melaporkan dugaan politik uang kepada pihak yang berwenang. Mahasiswa harus mampu menolak menerima hadiah atau uang dari calon untuk menentang politik uang.

Selain itu, penelitian Anggraini (2019) menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara keterlibatan politik masyarakat dengan pelaksanaan demokrasi lokal. Setiap suara yang diberikan berdampak pada masa depan suatu daerah. Sejumlah hal dapat memotivasi individu untuk ikut ambil bagian. Politik uang atau tukar-menukar dukungan politik saat pemilu sudah menjadi hal yang lumrah. Konsep demokrasi itu sendiri bisa jadi terkikis oleh alasan politik yang muncul dari transaksi politik uang. Masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih tertarik untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015 karena politik uang. Meskipun ada korelasi positif yang tipis antara politik uang dan keterlibatan politik, fenomena ini memengaruhi baik individu dengan pendapatan menengah ke bawah maupun mereka yang memperoleh kesejahteraan tinggi. Hal ini menunjukkan bagaimana politik uang di Kabupaten Dharmasraya memengaruhi semua lapisan sosial ekonomi.

f. Menjadi Anggota KPPS

Berdasarkan analisis terkait partisipasi perempuan sebagai anggota KPPS dalam pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh rata-rata sebesar 10%. Angka ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam peran tersebut sangat rendah. Beberapa faktor dapat menjelaskan rendahnya partisipasi ini. Pertama, kurangnya minat dan kesadaran perempuan tentang pentingnya peran mereka sebagai anggota KPPS mungkin membuat mereka tidak tertarik untuk terlibat.

Selain itu, sosialisasi mengenai rekrutmen KPPS mungkin belum berjalan dengan baik, sehingga banyak perempuan yang tidak mengetahui peluang ini. Komitmen waktu dan tanggung jawab yang tinggi juga dapat menjadi kendala, mengingat banyak perempuan yang sibuk dengan pekerjaan atau pendidikan mereka.

Penelitian ini sejalan dengan simpulan penelitian Sulistyowati dan Yakub (2024) yang berjudul "Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang Menjelang Pemilu 2024". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda sebagai anggota KPPS dalam Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 masih rendah karena berbagai alasan. Kurangnya rasa percaya diri pemuda, terutama yang kurang berpengalaman sebagai KPPS, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, dan kurangnya profesionalisme dalam rekrutmen menjadi beberapa kendala. Kondisi ini diperparah dengan sikap pemuda yang enggan berpartisipasi dalam proses pemilu. Meskipun sudah ada undang-undang yang mendukung keterlibatan pemuda, namun partisipasi yang luas sulit dicapai karena ketidakpercayaan PPS terhadap pemuda yang dianggap kurang berpengalaman.

Menurut kajian Pandiangan (2019), "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja," efektivitas KPPS berdampak signifikan terhadap mutu Pemilu 2019. Publik dan kandidat dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu jika pemilu tidak dilaksanakan dengan cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti imparialitas, integritas, dan kesetaraan. Mengingat besarnya cakupan kewajiban KPPS, maka sangat penting untuk melakukan penyesuaian organisasi serta peningkatan kesejahteraan dan fasilitas ketua dan anggota KPPS.

g. Menjadi Pengawas

Berdasarkan estimasi persentase perempuan yang menjadi pengawas TPS di Kabupaten Pesisir Selatan, ditemukan angka rata-rata 10%. Statistik ini menggambarkan betapa sedikitnya partisipasi perempuan dalam politik dan menduduki posisi pengawas di TPS. Dari angka partisipasi sebesar 10% tersebut, terlihat bahwa sangat sedikit perempuan yang bersedia mengemban tugas tersebut. Pengawas TPS memegang peranan penting dalam pemilu karena tugasnya adalah memastikan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Rendahnya angka partisipasi ini menunjukkan bahwa perempuan kurang menyadari atau kurang berminat untuk berpartisipasi dalam bagian krusial dan teknis dari proses demokrasi.

Menurut penelitian Millah N.S. & Dewi D.A. (2021), diharapkan dengan melibatkan masyarakat dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu secara aktif, akan menumbuhkan kesadaran para pelaku politik dan seluruh pihak yang

terlibat dalam pemilu, sehingga pemilu dapat berjalan lebih demokratis. Pemilu yang demokratis diharapkan dapat terwujud, baik dari segi prosedur maupun hasil, berkat adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi berbagai tahapan proses pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menawarkan program pelatihan SKPP sebagai upaya untuk melibatkan lebih banyak orang dalam pengawasan proses pemilu lokal maupun nasional. SKPP dibuat untuk memungkinkan keterlibatan pemilih dalam pemilu.

Penerima program kader SKPP diharapkan dapat meneruskan warisan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu lokal dan nasional. Investigasi ini sejalan dengan temuan (Zulhendra, 2019) Temuan studi menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengawasan pemilu diperlukan dan dibutuhkan. Salah satu pilar utama dalam menjalankan peran pengendalian pemilu adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Menggunakan media sosial dan teknologi informasi berbasis aplikasi di tempat umum merupakan salah satu strategi yang dianggap efisien dan berhasil. Tidak mungkin untuk membantah kecanggihan teknologi saat ini, mengingat seberapa cepatnya ia berkembang. Ada berbagai model sistem pengawasan pemilu berbasis masyarakat, termasuk pemetaan dan penguatan partisipan, penentuan konten informasi yang relevan, penyampaian informasi yang efisien, dan peran Panwaslu sebagai fasilitator.

Berikut ini rincian tingkat partisipasi politik perempuan pada pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 1: Rincian Tingkat Partisipasi Politik Perempuan

No	Jenis Partisipasi	Rata-Rata	Kategori
1	Voting	96%	Sangat Tinggi
2	Diskusi Politik	39%	Rendah
3	Menghadiri dan Mengikuti Kampanye	33,37%	Rendah
4	Menjadi Relawan Paslon	33,5%	Rendah
5	Menjadi Anggota KPPS	10%	Sangat Rendah
6	Menjadi Saksi Pemilu	17%	Sangat Rendah
7	Menjadi Pengawas TPS	10%	Sangat Rendah
Total		34,12%	Rendah

Sumber: Hasil Pengelolaan Data Penelitian 2024

Di Kabupaten Pesisir Selatan, keterlibatan politik perempuan dalam pemilihan presiden 2024 secara keseluruhan hanya sebesar 34,12%, yang merupakan persentase yang relatif rendah. Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di wilayah tersebut berpartisipasi dalam lebih sedikit kegiatan politik secara keseluruhan. Keterlibatan

mereka dalam kegiatan politik lainnya, termasuk percakapan politik, kehadiran dalam kampanye, dan peran teknis dalam penyelenggaraan pemilu, sangat terbatas, meskipun partisipasi pemilih mereka tinggi, yang merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang mendasar.

Persentase yang rendah ini menunjukkan betapa sedikitnya perempuan yang berpartisipasi dalam politik di luar pemungutan suara, seperti menjadi sukarelawan untuk mendukung pasangan calon, menjadi anggota KPPS, menjadi saksi pemilu, atau mengawasi TPS. Tingkat keterlibatan yang rendah ini dapat disebabkan oleh sejumlah hal, termasuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik saat ini, kurangnya pengetahuan atau minat terhadap politik, dan kurangnya waktu dan kesempatan untuk terlibat. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek proses politik, diperlukan tindakan dari sejumlah entitas, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan.

2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Presiden 2024

Untuk menjawab rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan dengan partisipasi politik perempuan, maka dapat dilihat dari analisis data penelitian sebagai berikut:

Tabel 2: hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik correlations

		Tingkat Pendidikan	Partisipasi Politik
Tingkat Pendidikan	Pearson Correlation	1	.197*
	Sig. (2-tailed)		.050
	N	100	100
Partisipasi Politik	Pearson Correlation	.197*	1
	Sig. (2-tailed)	.050	
	N	100	100

Sumber: Hasil Data Penelitian (2024)

Dengan nilai korelasi sebesar 0,197, temuan penelitian ini menunjukkan hubungan positif yang sangat sederhana antara aktivitas politik dan pencapaian pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun pengaruhnya tidak terlalu kuat, orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung tidak terlibat dalam aktivitas politik. Meskipun hubungan antara kedua variabel ini lemah, dapat diasumsikan bahwa ada hubungan

karena nilai signifikansi sebesar 0,050 menunjukkan bahwa hal itu signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik seseorang tidak terutama ditentukan oleh tingkat pendidikannya, meskipun hal itu memang berperan. Penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Nofitra dan Ishak (2016), "Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, 2014." Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aktivitas politik dan tingkat pendidikan tidak berkorelasi secara signifikan. Hasil uji hipotesis Chi-square, yang menunjukkan nilai signifikansi $\chi^2(2, N = 100) = 2,216; p > 0,05$, menjadi dasar untuk ini. Dengan kata lain, di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu sama dengan partisipasi politik yang kuat.

Temuan Patmisari (2019), yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara gender dan kesadaran politik siswa SMA sebagai pemilih baru di Kabupaten Bantul, juga bertentangan dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan politik siswa sebagai pemilih baru dipengaruhi oleh gender mereka.

Selain itu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Nur Iqrma dan Amrazi Zakso menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan pemilih baru berdampak pada tingkat keterlibatan politik mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Lebih lanjut, penelitian ini telah mengidentifikasi tiga aspek—faktor sosial dan lingkungan, faktor pribadi, faktor kesadaran, dan faktor kredibilitas terhadap pemerintah—yang memengaruhi keterlibatan politik pemilih baru.

3. Hubungan Jenis Pekerjaan dengan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Presiden 2024

Untuk menjawab rumusan masalah apakah terdapat hubungan antara jenis pekerjaan dengan partisipasi politik perempuan, maka dapat dilihat dari analisis data penelitian sebagai berikut:

Tabel 3: hubungan jenis pekerjaan dengan partisipasi politik

		Correlations	
		Jenis Pekerjaan	Partisipasi Politik
Jenis Pekerjaan	Pearson Correlation	1	-.142
	Sig. (2-tailed)		.159
	N	100	100
Partisipasi Politik	Pearson Correlation	-.142	1
	Sig. (2-tailed)	.159	
	N	100	100

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dengan nilai korelasi $-0,142$, terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara jenis pekerjaan dan aktivitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara kedua variabel, yang menunjukkan hubungan yang kecil antara jenis pekerjaan dan penurunan keterlibatan politik. Meskipun hubungannya sangat lemah, perbedaan jenis pekerjaan tampaknya agak terkait dengan penurunan partisipasi politik. Namun, hubungan ini tidak signifikan secara statistik, karena nilai signifikansi $0,159$ lebih tinggi dari $0,05$. Dengan kata lain, tidak ada cukup data untuk menyimpulkan bahwa sifat pekerjaan memengaruhi tingkat keterlibatan politik dalam penelitian ini.

Penelitian ini mendukung penelitian Suhartini dan Mahmud (2023), yang menemukan bahwa posisi sosial ekonomi dan lingkungan berdampak pada sikap orang terhadap keterlibatan dalam aktivitas politik. Ketika pendapatan orang buruk, mereka cenderung memilih keterlibatan yang terbatas dan mengikuti sistem yang ditetapkan oleh elit politik. Akibatnya, mereka mengutamakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan daripada kegiatan politik. Lebih lanjut, penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian Dewi (2020) yang menunjukkan bahwa tingkat sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap keterlibatan politik masyarakat dalam Pilkada Serentak Kota Banjar 2018 di Kecamatan Langensari. Tingkat partisipasi politik seseorang mencerminkan tingkat pengetahuan politiknya di masyarakat dan meningkat seiring dengan kedudukan sosial ekonominya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menyoroiti bahwa keterlibatan politik di Kota Padang tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan. Sebaliknya, tingkat sosial ekonomi dan karakteristik lainnya lebih berpengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan hanya sedikit mempengaruhi keterlibatan politik. Kedua faktor tersebut bukanlah penentu utama, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai korelasi yang rendah dan dapat diabaikan secara statistik.

Banyak faktor yang mempengaruhi keterlibatan politik selain hanya pekerjaan dan tingkat pendidikan. Jika tidak ada korelasi yang jelas antara kedua variabel tersebut, maka variabel lain seperti jenis kelamin, pendapatan, ketersediaan informasi, dan kesadaran politik mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar. Misalnya, kesenjangan berbasis gender dalam keterlibatan politik sering terlihat, dengan laki-laki biasanya berpartisipasi dalam politik pada tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan, meskipun kesenjangan ini secara bertahap menyempit. Faktor penting lainnya adalah pendapatan, karena mereka yang berpenghasilan lebih besar memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Ketersediaan informasi, khususnya melalui media sosial dan media arus utama, memiliki dampak signifikan pada keterlibatan politik seseorang. Orang yang memiliki akses mudah ke informasi biasanya lebih terinformasi secara politik dan terdorong untuk berpartisipasi. Komponen penting lainnya yang memengaruhi keterlibatan politik adalah tingkat kesadaran politik, yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, latar belakang sosial, dan pengalaman pribadi. Orang yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi biasanya lebih terlibat dalam proses politik, baik melalui pemungutan

suara, berpartisipasi dalam wacana politik, menjadi sukarelawan untuk kandidat politik, atau menyelenggarakan pemilihan umum.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan tergolong rendah, dengan angka hanya mencapai 34,12%. Namun, partisipasi tertinggi terletak pada kegiatan pemungutan suara, yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan aktif menggunakan hak pilih mereka. Di sisi lain, keterlibatan mereka dalam diskusi politik, kehadiran di kampanye, dan sebagai relawan pasangan calon tergolong rendah, meskipun menunjukkan minat yang cukup baik dibandingkan dengan aktivitas voting. Selanjutnya, partisipasi sebagai anggota KPPS dan pengawas TPS juga berada pada kategori sangat rendah. Ini mencerminkan bahwa meskipun perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat aktif dalam memberikan suara, keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pemilu masih sangat minim.

Hubungan yang sangat lemah ditemukan antara jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. Yang menunjukkan bahwa kedua elemen ini bukanlah prediktor utama keterlibatan politik adalah nilai korelasi yang rendah dan dapat diabaikan secara statistik. Sementara karier dan latar belakang pendidikan sering disebut sebagai karakteristik demografi yang dapat memengaruhi keterlibatan politik seseorang, keduanya tidak memiliki pengaruh yang jelas dalam konteks penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan dan pencapaian pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi keterlibatan politik. Mungkin ada faktor lain yang lebih penting yang memiliki pengaruh lebih besar pada tingkat keterlibatan politik seseorang mengingat korelasi yang lemah antara kedua faktor ini dan partisipasi politik. Faktor-faktor ini dapat mencakup jenis kelamin, pendapatan, akses ke informasi, dan kesadaran politik.

Pemerintah, KPU, dan penyelenggara pemilu disarankan untuk lebih memperhatikan kesadaran dan edukasi politik berdasarkan hasil penelitian. Mereka harus lebih gencar memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang pentingnya terlibat dalam politik, bukan hanya sekadar memberikan suara. Partai politik dan penyelenggara pemilu juga harus secara efektif menggunakan media sosial untuk merencanakan kampanye yang inovatif, terlibat dalam wacana politik yang interaktif, dan menyediakan data yang relevan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei daring, percakapan langsung, webinar, dan upaya periklanan yang menarik secara visual. Diharapkan inisiatif-inisiatif ini akan memberi perempuan peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wacana politik dan penyelenggaraan pemilu.

Referensi

Alfiyani, R., & Prihatmoko, J. J. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Beran Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 25-38.

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Azis, A. M., & Jatningsih, O. (2014). PARTISPASI POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWA TIMUR SURABAYA. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1172-1188.
- Damayanti, T. (2021). Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Politik Di Aceh (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pada Tahun 2019-2024) (Doctoral dissertation, UPT. PERPUSTAKAAN).
- Harun, R. R., Erwin, Y., Septyanun, N., Supryadi, A., Yamin, B., Fahrurrozi, F., & Yuliani, T. (2023). Perempuan dan Politik : Membangun Kesadaran Hukum Pemilih Perempuan Dalam Penggunaan Hak Suara Menjelang Pemilu 2024. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(2), 454-462.
- Khaerunisah, I., Japar, M., & Suhadi, S. (2018). Budaya Politik Perempuan Pesisir : Studi Perilaku Politik Perempuan Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 134-154.
- Maman, W. (2023). Strategi Komedi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355-363.
- Nuraini, R. (2011). Perilaku Politik Legislator Perempuan Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 2(2), 105-115.
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2020). Partisipasi dan Komunikasi Politik Perempuan di Legislatif menurut Kacamata Politik Perempuan di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119-29.
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2).
- Ramadhan, M. (2019). Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah. <http://repository.uinsu.ac.id>
- Rismawati, R., Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M. S. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11686-11697.

SEPVIANI, P. (2024). *ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEREMPUAN KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

Setiawan¹², T., Hikam, M. A., Suhartomo, A., Tamba, S. M., William, E., Hasibuan, A. M. K. K., ... & Arrazaq, T. A. Pendekatan Jaringan Sosial untuk Menganalisis Partisipasi Politik di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19: Scoping Review.

Sumendap, S. I., Pati, A. B., & Lambey, T. (2022). PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(2).

Syukur, M., & Ahmad, R. S. (2023). DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM WAJAH POLITIK DI INDONESIA: Gender Discrimination Against Women in the Face of Politics in Indonesia. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial*, 4(2), 165-174.

Talaohu, A. R. (2021). Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. *BESTERKUNDE*, 1(1), 15-28.

Tokan, F. B., Tagung, M., Servatius, R., & Niron, E. S. (2023). Tantangan Kultural Ata One dan Ata Peang Terhadap Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 3(1), 39-52.

Yoteni, A. A., Rizqi, A., & Tasty, H. N. (2023). Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. *Action Research Literate*, 7(9), 79-90.

Yvanka, V., & Adnan, M. F. (2022). Pengaruh Kebijakan Pilkada Masa Pandemi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, 6(1), 35-41.